



Strategi Optimalisasi Sumber Pembiayaan Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Di Era Digital

Holilur Rahman¹, Fariyah², Siti Wasilah³, Amani Bariroh⁴, Ririn Sri Kustinah⁵

1. Program Pascasarjana Universitas Al-Amien Prenduan, Indonesia
2. Program Pascasarjana Universitas Al-Amien Prenduan, Indonesia
3. Program Pascasarjana Universitas Al-Amien Prenduan, Indonesia
4. Program Pascasarjana Universitas Al-Amien Prenduan, Indonesia
5. Program Pascasarjana Universitas Al-Amien Prenduan, Indonesia

E-mail : holafif@gmail.com¹, fariyahazmi@gmail.com², wasilahsilag8@gmail.com³, kawaiiamany@gmail.com⁴, riznsri83@gmail.com⁵

Received: 17-03-2026

Revised: 15-04-2026

Accepted: 09-05-2026

How to Cite: Holilur Rahman, Fariyah, F., Siti Wasilah, Amani Bariroh, & Ririn Sri Kustinah. (2026). Optimizing Funding Sources to Improve Education Quality in the Digital Era. *Comprehensive: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Keguruan*, 2(2), 109-125. <https://doi.org/10.65118/comprehensive.v2i2.6>



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Optimizing Funding Sources to Improve Education Quality in the Digital Era

Abstract. This study aims to describe strategies for optimizing educational funding sources through digitalization of financial governance and analyze the obstacles faced by schools in its implementation. The digital era presents both opportunities and challenges for educational institutions in optimizing funding sources to improve educational quality. School financial management now relies not only on government funds but also demands innovation, transparency, and the use of digital technology. This study uses a descriptive qualitative approach with a review of relevant literature on educational funding management, school financial digitalization such as ARKAS, SIPLah, and e-RKAS, as well as supporting and inhibiting factors for implementation. The results of the discussion indicate that digitalization can increase transparency, accountability, and effectiveness of fund management, although obstacles remain such as limited internet access, ICT facilities, and low digital literacy among education personnel, especially in 3T areas. Optimization of funding can be achieved through diversifying funding sources, strengthening human resource capacity,

utilizing digital technology, and collaborating with the community and external institutions. With the right strategy, schools can improve educational quality sustainably and adapt to developments in the digital era.

Keywords: Education Financing, Education Quality, Digital Era, Budget Optimization, Education Management

Abstrak. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan strategi optimalisasi sumber pembiayaan pendidikan melalui digitalisasi tata kelola keuangan, serta menganalisis kendala yang dihadapi sekolah dalam penerapannya. Era digital memberikan peluang sekaligus tantangan bagi lembaga pendidikan dalam mengoptimalkan sumber pembiayaan untuk meningkatkan mutu pendidikan. Pengelolaan keuangan sekolah kini tidak hanya mengandalkan dana pemerintah, tetapi juga menuntut inovasi, transparansi, dan pemanfaatan teknologi digital. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan kajian literatur yang relevan mengenai manajemen pembiayaan pendidikan, digitalisasi keuangan sekolah seperti ARKAS, SIPLah, dan e-RKAS, serta faktor pendukung dan penghambat implementasi. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa digitalisasi mampu meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas pengelolaan dana, meskipun masih terdapat kendala seperti keterbatasan internet, sarana TIK, dan rendahnya literasi digital tenaga kependidikan, terutama di daerah 3T. Optimalisasi pembiayaan dapat dicapai melalui diversifikasi sumber dana, penguatan kapasitas SDM, pemanfaatan teknologi digital, dan kolaborasi dengan masyarakat serta lembaga eksternal. Dengan strategi yang tepat, sekolah mampu meningkatkan mutu pendidikan secara berkelanjutan dan adaptif terhadap perkembangan era digital.

Kata Kunci: Pembiayaan Pendidikan, Mutu Pendidikan, Era Digital, Optimalisasi Anggaran, Manajemen Pendidikan.

PENDAHULUAN

Dalam pembangunan nasional yang terus berubah serta di tengah arus globalisasi yang menuntut daya saing tinggi, pendidikan memainkan peran sentral sebagai pilar utama pembangunan sumber daya manusia. Pendidikan bukan sekadar alat reproduksi pengetahuan, tetapi juga fondasi strategis untuk menciptakan generasi yang adaptif, inovatif, dan kompeten menghadapi tantangan zaman. Oleh karena itu, penguatan tata kelola pendidikan, khususnya dalam aspek manajemen keuangan sekolah, menjadi prioritas penting dalam mendukung tercapainya mutu dan keberlanjutan pendidikan.¹

¹Prihanarko, R., & Hidayati, T. Sistem Informasi Keuangan Sekolah Swasta Berbasis Web (Studi Kasus SIMUTU di SD Muhammadiyah Bandung). *Jurnal Teknologi Informasi dan Administrasi Pendidikan*, 4(4), (2023) 78–85.

Namun, ada pendapat lain yang mengatakan ada beberapa persoalan yang sering terjadi dalam lembaga pendidikan salah satunya yaitu terkait dengan manajemen pembiayaan pendidikan diantaranya yaitu sumber dana yang terbatas, pencairan dana yang berasal dari pemerintah yaitu dana bantuan operasional sekolah (BOS) yang mengalami keterlambatan atau bahkan dana yang bisa dicairkan tidak sepenuhnya. Sedangkan pembiayaan di sekolah membutuhkan pemenuhan kebutuhan yang harus segera terpenuhi. Abdul Rokhim, dkk berpendapat dari aspek manajerial, kepala sekolah harus mampu memahami tugas dan proses manajemen pembiayaan pendidikan, mulai dari penyusunan RKAS (Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah) bagi sekolah, misalnya dengan sumber pendanaan dari BOS.²

Berbagai kajian menunjukkan bahwa efektivitas pemanfaatan dana BOS masih menghadapi kendala serius dalam hal transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi pengelolaan menegaskan bahwa lemahnya pengawasan internal di sekolah sering kali menyebabkan inefisiensi penggunaan dana dan rawan manipulasi laporan keuangan.³

Sebagai respons atas persoalan ini, pemerintah meluncurkan sistem e-RKAS (Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah berbasis elektronik) yang bertujuan mentransformasi sistem perencanaan dan pelaporan keuangan sekolah secara digital.⁴ Manajemen keuangan sekolah berfungsi bukan hanya sebagai instrumen administratif, tetapi juga sebagai mekanisme pengendalian strategis untuk menjamin efisiensi alokasi sumber daya, pemerataan akses, peningkatan mutu pembelajaran, serta akuntabilitas publik. Seiring berkembangnya era digital, proses pengelolaan dana pendidikan mengalami transformasi mendasar dengan masuknya teknologi informasi dalam berbagai aspek pengelolaan keuangan. Penggunaan aplikasi seperti ARKAS (Aplikasi Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah) dan SIPLah (Sistem Informasi Pengadaan Sekolah), serta sistem informasi mutu internal seperti SIMUTU (Sistem Informasi Manajemen Mutu), menjadi bentuk nyata digitalisasi dalam penganggaran, pelaporan, dan pengawasan dana satuan pendidikan.⁵

Hasil penelitian terdahulu oleh Ricky Trimiltin menunjukkan bahwa digitalisasi melalui e-RKAS menawarkan peluang signifikan dalam memperbaiki tata kelola keuangan pendidikan di Indonesia. Salah satu keunggulan utamanya adalah kemampuan sistem ini untuk mendukung pelaporan keuangan secara real-time, yang langsung terintegrasi dengan platform BOS Online. Hal ini memberikan

²Sri rustantinah, dkk. manajemen pembiayaan dalam peningkatan mutu di smp negeri 1 moga kabupaten *Pemalang*. Jurnal Pendidikan dan Konseling Volume 4 Nomor 6 Tahun 2022. h.5362

³Handayani, R., & Priyanto, E. Tata kelola Dana BOS dalam perspektif akuntabilitas. *Jurnal Akuntabilitas Pendidikan*, 3(1), (2019) 11–20

⁴Pitri, M. L., Nordin, N., Langputeh, S., & Rakuasa, H. (2025). Development of E-Module (Electronic Module) Based on Ethnoscience in Natural Science Subject of Human Reproduction for Junior High Schools. *JERIT: Journal of Educational Research and Innovation Technology*, 2(1), 46–61

⁵Prihanarko, R., & Hidayati, T. Sistem Informasi Keuangan Sekolah Swasta Berbasis Web (Studi Kasus SIMUTU di SD Muhammadiyah Bandung). *Jurnal Teknologi Informasi dan Administrasi Pendidikan*, 4(4), (2023) 78–85.

kejelasan dan kemudahan dalam audit internal maupun eksternal, serta mempercepat proses administrasi pengelolaan dana⁶

Walaupun berpotensi tinggi, menurut Raharjo penerapan e-RKAS tidak luput dari berbagai tantangan teknis dan struktural, terutama di daerah 3T. Studi mencatat bahwa keterbatasan infrastruktur teknologi seperti jaringan internet yang tidak stabil, kurangnya perangkat komputer, dan lemahnya dukungan listrik menghambat sekolah dalam memanfaatkan sistem ini secara maksimal.⁷

Tantangan lain menurut Simanjuntak yang signifikan adalah rendahnya literasi digital tenaga kependidikan, terutama kepala sekolah dan bendahara. Banyak pengelola sekolah masih bergantung pada pihak ketiga atau operator eksternal dalam mengisi dan mengoperasikan e-RKAS, yang berpotensi mengurangi kontrol dan rasa kepemilikan terhadap data keuangan sekolah.⁸

Dengan demikian, keberhasilan implementasi e-RKAS tidak semata-mata ditentukan oleh kecanggihan teknologinya, tetapi sangat bergantung pada bagaimana kebijakan dikembangkan untuk menciptakan ekosistem pendidikan yang inklusif, responsif, dan berdaya adaptasi tinggi. Pemerintah perlu menempatkan digitalisasi tata kelola pembiayaan pendidikan sebagai bagian dari transformasi sistemik yang melibatkan penguatan infrastruktur, kapasitas sumber daya manusia, dan reformasi birokrasi pendidikan. Pendekatan ini akan menjamin bahwa e-RKAS tidak hanya menjadi alat pelaporan, tetapi juga instrumen strategis dalam mewujudkan tata kelola pendidikan yang transparan, efektif, dan berkelanjutan di seluruh pelosok Indonesia.

Ketertinggalan dunia Pendidikan di Indonesia, tidak terlepas dari berbagai faktor yang terdapat di wilayah atau daerahnya masing-masing. Perbedaan letak geografis, sosial ekonomi, pendapatan perkapita penduduknya sangat memengaruhi perkembangan sektor Pendidikan di wilayah tersebut, sehingga pengalokasian anggaran sebesar 20% dari APBN dan APBD untuk sektor Pendidikan di setiap daerah, kurang tepat atau tidak relevan dengan realitas kebutuhan pada sektor Pendidikan di wilayahnya masing-masing.⁹

Dari sisi teori pendukung, konsep manajemen pembiayaan pendidikan menekankan bahwa pengelolaan dana harus mencakup proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, hingga pengawasan untuk mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Teori manajemen strategis juga menyatakan bahwa lembaga pendidikan perlu menerapkan strategi yang adaptif, kreatif, dan berbasis potensi lokal dalam menggali sumber pembiayaan. Pendekatan ini penting agar sekolah mampu mempertahankan mutu pendidikan secara berkelanjutan.

⁶Ricky Trimiltin, dkk. *Digitalisasi tata kelola pembiayaan pendidikan peluang dan tantangan implementasi e-rkas*. jurnal manajemen pendidikan Vol. 10, No. 3, September (2025) 890

⁷Raharjo, M. Disparitas pemanfaatan Dana BOS di wilayah 3T. *Jurnal Administrasi Pendidikan Nusantara*, 9(1), (2024) 34-42.

⁸Simanjuntak, T. Digitalisasi pelaporan Dana BOS: Studi kasus di Kabupaten Banyuwangi. *Jurnal Teknologi Pendidikan*, 15(1), (2023) 25-34

⁹Anis Zohriah, dkk. *Manajemen pembiayaan pendidikan di lembaga pendidikan: konsep, landasan hukum, dan model*. jurnal indopedia (inovasi pembelajaran dan pendidikan) vol 1, No 2, juni 2023. h 444

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi dan manfaat berupa model strategi yang dapat diterapkan oleh lembaga pendidikan dalam mengoptimalkan berbagai sumber pembiayaan. Selain itu, hasil penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi pemangku kebijakan, pengelola sekolah, dan masyarakat dalam memahami pentingnya diversifikasi pembiayaan demi peningkatan mutu pendidikan. Dengan adanya strategi yang tepat, sekolah dapat lebih mandiri, inovatif, dan berdaya saing sehingga mutu pendidikan dapat meningkat secara signifikan dan berkelanjutan. Dalam konteks perkembangan era digital, strategi ini semakin relevan karena teknologi memungkinkan proses pengelolaan dana dilakukan dengan lebih cepat, transparan, dan akuntabel. Digitalisasi juga membuka peluang baru bagi sekolah untuk mengakses sumber pendanaan alternatif melalui platform donasi daring, sistem informasi keuangan, maupun kerja sama berbasis teknologi, sehingga upaya peningkatan mutu pendidikan dapat dilakukan secara lebih efektif dan berkesinambungan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang bertujuan menggambarkan strategi optimalisasi sumber pembiayaan dalam meningkatkan mutu pendidikan di era digital. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi yang kemudian dianalisis menggunakan model Miles & Huberman, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Penelitian ini dilaksanakan di UPTD SDN Ketapang Laok I Ketapang, Kabupaten Sampang, sebagai lokasi yang relevan dalam mengkaji pengelolaan pembiayaan berbasis digital.

HASIL PENELITIAN

Hasil kajian menunjukkan bahwa digitalisasi melalui e-RKAS dan SIPLah di UPTD SDN Ketapang Laok I Ketapang meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana sekolah. Selain itu, menawarkan peluang signifikan dalam memperbaiki tata kelola keuangan pendidikan di Indonesia. Salah satu keunggulan utamanya adalah kemampuan sistem ini untuk mendukung pelaporan keuangan secara real-time, yang langsung terintegrasi dengan platform BOS Online. Hal ini memberikan kejelasan dan kemudahan dalam audit internal maupun eksternal, serta mempercepat proses administrasi pengelolaan dana.¹⁰

Selain itu, sistem ini memperkuat prinsip good governance dalam pengelolaan pendidikan, yakni transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi.¹¹ Adanya sistem digital, sekolah-sekolah di daerah terpencil pun menjadi lebih tertib dalam perencanaan dan pengeluaran karena setiap transaksi wajib melalui proses validasi berbasis sistem yang terdokumentas.¹² Lebih jauh, sistem ini memberikan peluang untuk

¹⁰ Ricky Trimiltin, dkk. Digitalisasi tata kelola pembiayaan pendidikan: peluang dan tantangan implementasi erkas. *JURNAL MANAJEMEN PENDIDIKAN*. Vol. 10, No. 3, September (2025): 890

¹¹ Ibid., 891

¹² Gunawan, A., & Putra, I. W. Akuntabilitas penggunaan Dana BOS di sekolah terpencil Provinsi NTT. *Jurnal Audit Publik*, 5(1), (2022). 55–66.

menyelaraskan pembiayaan dengan digitalisasi pembelajaran melalui BOS Afirmasi, di mana penggunaan anggaran bias diarahkan untuk peningkatan sarana TIK seperti laptop, proyektor, dan jaringan internet.¹³

Namun, Walaupun berpotensi tinggi, penerapan e-RKAS tidak luput dari berbagai tantangan teknis dan struktural, terutama di daerah 3T. Studi mencatat bahwa keterbatasan infrastruktur teknologi seperti jaringan internet yang tidak stabil, kurangnya perangkat komputer, dan lemahnya dukungan listrik menghambat sekolah dalam memanfaatkan sistem ini secara maksimal.¹⁴ Tantangan lain yang signifikan adalah rendahnya literasi digital tenaga kependidikan, terutama kepala sekolah dan bendahara. Banyak pengelola sekolah masih bergantung pada pihak ketiga atau operator eksternal dalam mengisi dan mengoperasikan eRKAS, yang berpotensi mengurangi kontrol dan rasa kepemilikan terhadap data keuangan sekolah.¹⁵

Dengan demikian temuan di lapangan menunjukkan bahwa setelah penerapan e-RKAS dan SIPLah, proses penyusunan anggaran dan pelaporan dana BOS di UPTD SDN Ketapang Laok I menjadi lebih tertib, cepat, dan transparan. Namun, rendahnya literasi digital dan keterbatasan infrastruktur masih menjadi faktor penghambat implementasi. Kondisi ini menunjukkan bahwa digitalisasi pengelolaan keuangan perlu diikuti dengan pelatihan SDM dan penguatan fasilitas teknologi agar mampu memberikan dampak optimal terhadap peningkatan mutu pendidikan.

PEMBAHASAN

Konsep Pembiayaan Pendidikan

a. Definisi Pembiayaan Pendidikan

Menurut Nursobah pembiayaan merupakan proses alokasi sumber daya pada kegiatan atau program tertentu. Sehingga pembiayaan pendidikan merupakan proses alokasi sumber daya untuk kegiatan atau program operasional pendidikan. Pembiayaan pendidikan bukan tanggung jawab pemerintah saja melainkan tanggung jawab semua pihak, baik pemerintah, orang tua dan masyarakat. Dalam sektor pendidikan, pembiayaan merupakan salah satu sumber daya yang secara langsung dapat menunjang keefektifan dan efisiensi pengelolaan pendidikan. Kemampuan mengukur efisiensi pengelolaan dana pendidikan, fokus pada penggunaan dana dengan nilai guna daripada hanya menganalisis sumber dana. pembiayaan pendidikan proses pendapatan yang ada dialokasikan dalam merangkai dan memproses jalannya program kegiatan di sekolah pada setiap jenjangnya.¹⁶

¹³ Nugroho, Y., Permana, S., & Lestari, D. Implementasi BOS afirmasi dalam peningkatan sarana digital sekolah. *Jurnal Kebijakan Pendidikan*, 11(2), . (2021). 120–132.

¹⁴ Raharjo, M. Disparitas pemanfaatan Dana BOS di wilayah 3T. *Jurnal Administrasi Pendidikan Nusantara*, 9(1), (2024). 34–42.

¹⁵ Simanjuntak, T. Digitalisasi pelaporan Dana BOS: Studi kasus di Kabupaten Banyuwangi. *Jurnal Teknologi Pendidikan*, 15(1), (2023). 25–34.

¹⁶ Nadhifa Ardiana Maharani et al., "Analisis Sumber Dan Jenis Pembiayaan Pendidikan Di Indonesia", *Jurnal Bintang Pendidikan Indonesia*, vol. 4, no. 1 (2024), 28.

Pembiayaan pendidikan terdiri atas biaya investasi, biaya operasi, dan biaya personal. Biaya investasi satuan pendidikan sebagaimana dimaksud di atas meliputi biaya penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sumber daya manusia, dan modal kerja tetap. Lebih lanjut, biaya personal meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan. Biaya operasi satuan pendidikan sebagaimana dimaksud meliputi: a) gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta segala tunjangan yang melekat pada gaji; b) bahan atau peralatan pendidikan habis pakai; dan c) biaya operasi pendidikan tak langsung berupa daya, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi, dan lain sebagainya.¹⁷

b. Model-Model Pembiayaan Pendidikan

- 1) Model Dana Bantuan Murni (Flat Grant Model) Merupakan uang bantuan negara yang dibagikan pada sekolah di daerah tanpa memperhitungkan pertimbangan kemampuan pembayaran pajak daerah setempat, yang didasarkan pada jumlah siswa yang harus dididik. Kelebihan model Dana Bantuan Murni
- 2) Model Landasan Perencanaan (Foundation Plan Model) Model yang menggambarkan bahwa negara tanpa mempertimbangkan kekayaan dan pajak daerah memberikan dana kepada daerah yang miskin lebih banyak untuk setiap siswanya dibandingkan dengan daerah yang makmur.
- 3) Model Perencanaan Pokok Jaminan Pajak (Guaranteed Tax Base Plan) Model ini dibatasi dengan menentukan penafsiran penilaian per siswa yang menjadi jaminan negara diperuntukkan bagi wilayah sekolah setempat. Bantuan negara menjadi berbeda antara apa yang diterima daerah per siswa dengan jaminan negara per siswa. Pembagian persentasenya sangat tinggi di sekolah distrik yang miskin, dan rendah di sekolah distrik yang kaya/sejahtera.
- 4) Model Persamaan Persentase (Percentage Equalizing Model) Model ini dikembangkan tahun 1920-an, lebih banyak memberikan sumbangan yang dibutuhkan pada tiap murid & guru ke daerah-daerah yang kurang makmur. Dalam program yang sama, jumlah pembayaran yang disetujui dihitung bagi setiap siswa, tiap guru, atau bagian lain yang di butuhkan. Jumlah yang diperlukan berubah-ubah tiap bagian sesuai keperluan.
- 5) Model Perencanaan Persamaan Kemampuan (Power Equalizing Plan) Model ini menghendaki distrik yang kaya membayar pajak sekolah yang dikumpulkan kembali ke negara. Selanjutnya negara menggunakan uang dari sekolah distrik yang kaya itu untuk meningkatkan bantuan sekolah pada distrik yang lebih miskin.¹⁸

¹⁷ Ferdi W. P, "Pembiayaan Pendidikan: Suatu Kajian Teoritis", *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, vol. 19, no.4 (2013),568.

¹⁸ Oktrigana Wirian, et al, Model-Model Pembiayaan Pendidikan, *Jurnal Ilmu Pendidikan dan Pengajaran*, Vol. 1, no. 1 (2022), 47-48

Mutu Pendidikan

a. Pengertian Mutu Pendidikan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia “mutu” berarti ukuran baik buruknya sesuatu, kualitas, taraf atau derajat (kepandaian, kecerdasan).⁹ Mutu adalah gambaran dan karakteristik menyeluruh dari barang atau jasa yang menunjukkan kemampuannya dalam memuaskan kebutuhan yang diharapkan. Dalam konteks pendidikan, pengertian mutu mencakup input, proses dan output pendidikan.¹⁰ Menurut Rusman, antara proses dan hasil pendidikan yang bermutu saling berhubungan. Akan tetapi, agar proses yang baik itu tidak salah arah, maka mutu dalam dalam artian hasil (out put) harus dirumuskan lebih dahulu oleh sekolah, dan harus jelas target yang akan dicapai setiap tahun atau kurun waktu lainnya.¹⁹

Dari uraian pendapat di atas jelas bahwa mutu pendidikan adalah suatu pilar untuk mengembangkan sumber daya manusia (SDM). Yang mana suatu masa depan bangsa itu terletak pada keberadaan kualitas pendidikan yang berada pada masa kini. Suatu pendidikan yang berkualitas akan muncul apabila terdapat manajemen sekolah yang bagus. Mutu juga merupakan suatu ajang berkompetisi yang sangat penting, karena itu merupakan suatu wahana untuk meningkatkan mutu produk layanan jasa. Dengan demikian, mewujudkan suatu pendidikan yang bermutu adalah penting, sebagai upaya peningkatan masa depan bangsa sekaligus sebagian dari produk layanan jasa.

b. Indikator Mutu Pendidikan

Nurhayati menjelaskan dalam perspektif makro terdapat banyak faktor yang mempengaruhi mutu pendidikan, diantaranya faktor kurikulum, kebijakan pendidikan, fasilitas pendidikan, aplikasi teknologi informasi dan komunikasi dalam dunia pendidikan, khususnya dalam kegiatan proses belajar mengajar, aplikasi metode, strategi dan pendekatan pendidikan yang mutakhir dan modern, metode evaluasi pendidikan yang tepat, biaya pendidikan yang memadai, manajemen pendidikan yang dilaksanakan secara profesional, sumber daya manusia para pelaku pendidikan yang terlatih, berpengetahuan, berpengalaman dan professional.²⁰

Dalam konteks pendidikan, mutu pendidikan mencakup input, proses dan output. Input pendidikan adalah segala hal yang harus tersedia karena dibutuhkan untuk berlangsungnya proses yang meliputi sumber daya dan perangkat lunak serta harapan-harapan sebagai pemandu bagi berlangsungnya proses. Kesiapan input sangat diperlukan agar proses dapat berlangsung dengan sangat baik, sehingga kadar input dapat diukur dari tingkat kesiapan input. Proses pendidikan merupakan kejadian berubahnya sesuatu menjadi sesuatu yang lain. Proses yang dimaksud ialah proses pengambilan keputusan, proses pengelolaan kelembagaan, proses pengelolaan program, proses belajar mengajar, serta proses monitoring dan evaluasi. Proses dikatakan bermutu tinggi bila pengkoordinasian dan penyerasian serta pemaduan input sekolah dilakukan secara harmonis dan terpadu sehingga mampu mendorong motivasi serta minat belajar.

¹⁹ Rusman, Manajemen Kurikulum, Jakarta: Raja Wali Pers, (2009), 555

²⁰ Muhammad Fadhli, Manajemen Peningkatan Mutu Pendidikan, Jurnal Studi Manajemen Pendidikan, Vol. 1, No. 02, (2017), 218.

Output pendidikan adalah adalah kinerja sekolah, yaitu prestasi sekolah yang dihasilkan dari proses sekolah atau madrasah. Kinerja sekolah atau madrasah dapat diukur dari kualitasnya, efektivitasnya, produktivitasnya, esensinya, inovasinya, kualitas kerja hidupnya, dan moral kerjanya. Output sekolah dikatakan bermutu tinggi jika prestasi sekolah atau madrasah baik dalam prestasi akademik maupun nonakademik. Prestasi akademik meliputi nilai ulangan harian, nilai portofolio, nilai ulangan umum atau nilai pencapaian ketuntasan kompetensi, nilai ujian nasional (NUAN) atau nilai ujian akhir sekolah (NUAS), karya ilmiah, lomba akademik, karya-karya lain siswa. Sedangkan nilai prestasi nonakademik misalnya kejujuran, kedisiplinan, olahraga, kesenian, dan sebagainya.²¹

Pendidikan Era Digital

a. Transformasi Pendidikan Di Era Digital

Dalam era yang terus bertransformasi dengan pesat, pendidikan tidak dapat menghindar dari dampak revolusi digital yang melanda segala bidang kehidupan. Sejak beberapa dekade terakhir, kemajuan teknologi telah mengubah secara mendasar cara kita berinteraksi dengan informasi, budaya, dan tentu saja, proses pendidikan. Pergeseran ini, dari pembelajaran konvensional menuju penggunaan teknologi digital, membawa konsekuensi dan potensi yang mendalam untuk mengubah lanskap pendidikan global.²²

Transformasi Digital dalam Pendidikan Indonesia telah menjadi prioritas strategis dalam pendidikan nasional, terutama setelah pandemi mempercepat kebutuhan akan teknologi dalam pembelajaran. Kebijakan Peraturan Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Nomor 7607/B.B1/HK.03/2023 menjadi salah satu langkah nyata pemerintah untuk mendukung transformasi ini melalui pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah berbasis teknologi.²³

Kebijakan ini menekankan pentingnya penggunaan teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam evaluasi kinerja. Dengan memanfaatkan sistem berbasis data, kebijakan ini bertujuan untuk memperkuat akuntabilitas dan mendukung perencanaan pengembangan profesional yang lebih efektif. Namun, keberhasilan implementasi kebijakan ini sangat bergantung pada kesiapan infrastruktur teknologi dan literasi digital tenaga pendidik.²⁴

²¹ Widiyarti dan Suranto, Konsep Mutu dalam Manajemen Pendidikan Vokasi, (Semarang: ALPRIN), (2019), 4-5

²² Sindi Septia Hasnida, dkk. *Transformasi Pendidikan Di Era Digital*. Jurnal Bintang Pendidikan Indonesia (JUBPI) Vol.2, No.1 Februari (2024).111

²³ Kemendikbud. *Peraturan Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan*. Nomor 7607/B.B1/HK.03/2023. Kemendikbud.(2023).54

²⁴ Kusnadi, F., & Rachmawati, T. (2022). Literasi digital guru dalam era pendidikan 4.0 di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Digital*, 6(1), 45

Salah satu tantangan utama dalam implementasi kebijakan ini adalah keterbatasan infrastruktur di daerah terpencil.²⁵ Menurut Kusnadi & Rachmawati menunjukkan bahwa hanya 80% siswa di Indonesia memiliki akses internet yang memadai, sementara sebagian besar sekolah di daerah terpencil masih bergantung pada teknologi konvensional. Tantangan ini diperparah oleh rendahnya tingkat literasi digital di kalangan guru, yang sering kali menghambat mereka untuk memanfaatkan teknologi secara maksimal. Sebagai contoh, banyak guru yang masih menggunakan metode manual dalam mengelola kinerja, meskipun perangkat digital telah disediakan. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan yang berbasis teknologi harus diimbangi dengan program pelatihan yang komprehensif untuk memastikan efektivitas implementasinya.²⁶

Sumber-sumber Pembiayaan Pendidikan

1. Pemerintah Pusat dan Daerah
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)

Dana pendidikan dari APBN dan APBD merupakan biaya langsung yang meliputi penggajian guru, administrator, staf sekolah, pembelian peralatan, materi pelajaran, dan gedung sekolah. Setidaknya 20% dari APBD dialokasikan untuk pendidikan selain gaji dan biaya pendidikan kedinasan. Sumber dana APBD berasal dari APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota, yang ditentukan oleh kondisi keuangan setempat.²⁷
 - b. Dana Alokasi Khusus (DAK)

Dana Alokasi Khusus (DAK) Adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Khususnya untuk membiayai kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat yang belum mencapai standar tertentu atau mendorong percepatan pembangunan daerah.²⁸
 - c. Bantuan Operasional Sekolah BOS

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2019, BOS adalah program pemerintah untuk penyediaan pendanaan biaya operasi non-personalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar. BOS merupakan program pemerintah yang bertujuan untuk meringankan beban

²⁵Girsang, A. P. L., Agustuna, R., Sulistyowati, N. P., Sulistyowati, R., & Nugroho, S. W. (2024). Statistik Pendidikan 2024. In Badan Pusat Statistik (Vol. 13). Badan Pusat Statistik. <https://doi.org/10.25104/mtm.v16i1.840>

²⁶ Yulianto, B., & Arifin, M. (2021). Transformasi digital dalam pendidikan: Sebuah analisis kebijakan. *Jurnal Kebijakan Pendidikan*, 9(3), 221–233.

²⁷ Nadhifa Ardiana Maharani et al., “Analisis Sumber Dan Jenis Pembiayaan Pendidikan Di Indonesia”, *Jurnal Bintang Pendidikan Indonesia*, vol. 4, no. 1 (2024),32

²⁸ J.M Tedjawati, “Kajian Pelaksanaan Dana Khusus Bidang Pendidikan,” *Jurna Pendidikan dan Kebudayaan*, vol.7, no.5 (2011), 609.

biaya pendidikan bagi siswa dengan menyediakan dana operasional sekolah. Dana ini dialokasikan per siswa per tahun dan penggunaannya diatur dalam petunjuk teknis yang ditetapkan pemerintah. Peran dana BOS yaitu untuk pembiayaan kegiatan pembelajaran dan pembiayaan kegiatan lainnya.²⁹

2. Sumber dana dari Masyarakat

Sumber dana dari masyarakat berupa sumbangan yang berhubungan baik dari perseorangan maupun dari yayasan atau perusahaan yang ada di dalam maupun luar negeri yang mempunyai perhatian besar terhadap sektor pengembangan bidang pendidikan. Sumber dana ini dapat dikatakan sangat efektif untuk menunjang pelaksanaan kegiatan pembangunan pendidikan, khususnya demi kelancaran pendidikan yang diselenggarakan oleh lembaga swasta.³⁰

- a. Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) dari orang tua/wali murid
- b. Komite sekolah dapat menghimpun dana dari orang tua atau wali murid secara sukarela untuk mendukung program-program sekolah yang telah disepakati bersama.³¹
- c. Sumbangan Alumni sebagai bentuk kepedulian sosialnya terhadap almamaternya menjadi salah satu sumber biaya pendidikan perlu dipertimbangkan, mengingat besarnya jumlah alumni yang dihasilkan setiap tahunnya berpotensi dapat menghasilkan besarnya sumbangan potensi sumbangan dana pendidikan dari alumni sangat besar sekali jika dikelola dengan baik.
- d. Sumbangan yang tidak mengikat dari berbagai pihak juga bisa menjadi bagian dari sumber pembiayaan pendidikan di Indonesia. Masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam sebenarnya memiliki sumber pembiayaan pendidikan yang sangat potensial, besar, kaya, melimpah dan berkesinambungan. Sumber yang dimaksud adalah ZISWA (zakat, infak, sadaqah dan wakaf).³²

Strategi Optimalisasi Sumber Pembiayaan

Dalam konteks ini, optimalisasi pembiayaan melalui perencanaan anggaran, diversifikasi sumber dana, manajemen keuangan berbasis digital, serta system pengawasan dan evaluasi menjadi strategi kritis untuk meningkatkan mutu pendidikan secara berkelanjutan.³³

²⁹ Nanu Andriani et al., "Manajemen Pembiayaan Pendidikan Melalui Integrasi Sumber Sumber Pendanaan", *Jurnal Pelita Nusantara: Kajian Ilmu Sosial Multidisiplin*, vol.2, no.2 (2024), 206.

³⁰ Nurhayati dkk, *Dasar-Dasar Manajemen Pendidikan*, (Surabaya : Global Aksara Pers 2022),3.

³¹ Nanu Andriani et al., "Manajemen Pembiayaan Pendidikan Melalui Integrasi Sumber Sumber Pendanaan", *Jurnal Pelita Nusantara: Kajian Ilmu Sosial Multidisiplin*, vol.2, no.2 (2024), 207.

³² Alif Fiandi and Junaidi, "Sumber Sumber Dana Pendidikan," *Jurnal Basicedu*, vol. 4, no. 4 (2022),10418.

³³Dery Shadani dan Muhammad IrwanPadli Nasution, "Optimalisasi Pengelolaan Informasi Data Untuk Peningkatan Kualitas Layanan Di Era Digital," *Journal Of Informatics And Busines*, vol.2, no. 1 (5 Juni 2024): 47-51.

Selain sebagai instrumen pendukung operasional pendidikan, pembiayaan juga memiliki peran strategis dalam menentukan arah perkembangan dan kapasitas lembaga pendidikan untuk beradaptasi dengan dinamika sosial, teknologi, dan kebutuhan peserta didik. Dalam era digital dan transformasi pendidikan saat ini, sekolah dituntut tidak hanya mampu menyediakan layanan dasar, tetapi juga mengembangkan inovasi pembelajaran, memperbarui sarana digital, serta meningkatkan kompetensi pendidik secara berkala. Semua proses ini menuntut pengelolaan keuangan yang tidak hanya mengalir apa adanya, tetapi dikelola berdasarkan kajian yang terukur dan terencana. Pada titik ini, perencanaan pembiayaan menjadi keharusan agar setiap keputusan finansial memiliki dasar kebutuhan, proyeksi manfaat, dan perkiraan risiko. Tanpa adanya perencanaan menyeluruh, sekolah akan kesulitan mengantisipasi perkembangan jangka panjang, menghadapi keterbatasan anggaran secara tiba-tiba, serta gagal mencapai target mutu pendidikan yang diharapkan.³⁴

a) Analisis Kebutuhan dan Perencanaan Anggaran

Perencanaan anggaran merupakan langkah awal yang strategis dalam manajemen keuangan sekolah. Melalui identifikasi kebutuhan sekolah baik untuk operasional rutin, pemeliharaan fasilitas, pengembangan sumber daya manusia, hingga inovasi berbasis teknologi sekolah dapat menyusun alokasi dana berdasarkan prioritas kebutuhan nyata. Tanpa perencanaan yang matang, alokasi dana dapat tersebar tidak fokus, terjadi pemborosan, atau pengeluaran yang tidak tepat sasaran. Ini mengakibatkan dana yang tersedia tidak optimal dalam menunjang proses pendidikan. Penelitian dalam konteks sekolah dasar menunjukkan bahwa perencanaan melalui dokumen seperti RAPBS (Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah) secara sistematis membantu memastikan bahwa anggaran dialokasikan sesuai kebutuhan aktual sekolah.

b) Penguatan Sumber Pembiayaan Internal

Sumber pembiayaan internal seperti iuran orang tua, SPP (sekolah swasta), sumbangan yayasan, alokasi dana rutin tetap menjadi tulang punggung pendanaan di banyak sekolah, terutama swasta. Mengandalkan satu sumber saja berisiko pada ketidakstabilan keuangan jika ada perubahan demografis siswa atau penurunan daya bayar. Oleh karena itu, strategi diversifikasi internal diperlukan untuk memperkuat basis pendanaan.³⁵

c) Pengembangan Sumber Pembiayaan Eksternal

Mengingat keterbatasan dana internal, banyak sekolah mulai mengeksplorasi sumber eksternal sebagai pelengkap seperti donasi masyarakat, sumbangan alumni, CSR dari perusahaan, hibah, atau crowdfunding. Diversifikasi sumber eksternal ini

³⁴ Nayla Eka Syamsiyah, "Strategi Efektif dalam Perencanaan Biaya dan Optimalisasi Sumber Pendanaan Satuan Pendidikan Islam," *Studi Ilmu Manajemen dan Organisasi*, vol.6, no. 2 (16 Juli 2025): 293–304.

³⁵ *Ibid.*, 296

dapat menjadi solusi strategis untuk mendukung program pengembangan sekolah, inovasi pembelajaran, dan peningkatan fasilitas.³⁶

d) Peningkatan Kapasitas Manajemen Keuangan

Transparansi dan akuntabilitas merupakan dua prinsip penting dalam manajemen keuangan sekolah. Keduanya tidak hanya meningkatkan kepercayaan stakeholder (guru, orang tua, komite sekolah, masyarakat), tetapi juga mendukung efisiensi dan efektivitas penggunaan dana. Ketika semua pemangku kepentingan dapat mengakses informasi penggunaan dana, maka potensi penyalahgunaan dana dapat diminimalisir. Di era digital, penerapan sistem keuangan berbasis aplikasi termasuk pelaporan, anggaran, penerimaan dan pengeluaran semakin memungkinkan.³⁷

e) Monitoring dan Evaluasi Penggunaan Pembiayaan

Optimalisasi pembiayaan tidak berhenti pada perencanaan dan alokasi namun perlu dilengkapi dengan monitoring, evaluasi, dan pelaporan secara periodik. Monitoring dan evaluasi memungkinkan sekolah mengukur apakah dana digunakan sesuai rencana, tepat sasaran, dan memberikan hasil yang diharapkan. Indikator keberhasilan dapat meliputi efisiensi penggunaan dana, pemenuhan kebutuhan sarana-prasarana, kualitas pembelajaran, serta hasil belajar siswa.

Implikasi Optimalisasi Pembiayaan terhadap Mutu Pendidikan

Menggabungkan seluruh strategi perencanaan yang matang, diversifikasi sumber dana, manajemen internal yang efisien, transparansi, digitalisasi, serta monitoring dan evaluasi akan memiliki implikasi nyata terhadap mutu pendidikan. Beberapa implikasinya antara lain:

- a. Penyediaan sarana-prasarana yang memadai, infrastruktur, laboratorium, perpustakaan, ruang kelas yang layak, perangkat digital.
- b. Peningkatan kualitas pembelajaran, guru dapat dilatih secara profesional, materi pembelajaran diperbarui, metode pengajaran lebih inovatif.
- c. Stabilitas operasional sekolah, sekolah tidak mudah goyah jika terjadi fluktuasi sumber dana, ketahanan finansial memungkinkan keberlanjutan program.
- d. Keterlibatan stakeholder dan masyarakat, transparansi dan akuntabilitas meningkatkan partisipasi orang tua, komite sekolah, alumni, dan masyarakat dalam mendukung sekolah.
- e. Reputasi dan kepercayaan publik, sekolah dianggap kredibel, profesional, dan dipercaya penting untuk menarik siswa baru, donor, dan mendukung keberlanjutan.
- f. Capaian hasil belajar dan prestasi siswa, dengan fasilitas dan kualitas pembelajaran yang lebih baik, potensi prestasi akademik dan non-akademik siswa meningkat,

³⁶ Andi Dwinamurti Christanti dkk., "Strategi Mutu Sumber Pembiayaan Berbasis Asset Based Community Development (Abcd) Di Smp N 1 Rawalo," *Manajerial : Jurnal Inovasi Manajemen dan Supervisi Pendidikan*, vol.4, no. 4 (26 Februari 2025): 334-341.

³⁷ Nike Nur Farida dkk., "Transformasi Digitalisasi Manajemen Keuangan dan Peningkatan Kapasitas Produksi UMKM Pie Ngalam Heritage melalui Program Pelatihan Berbasis Mitra," *I-Com: Indonesian Community Journal*, vol.5, no. 3 (30 September 2025): 1731-1742.

mendukung kualitas lulusan.³⁸

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian di UPTD SDN Ketapang Laok I Ketapang, dapat disimpulkan bahwa manajemen pembiayaan berbasis digital melalui e-RKAS, ARKAS, dan SIPLah berperan signifikan dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas pengelolaan dana pendidikan. Implementasi digitalisasi keuangan memungkinkan proses perencanaan, pelaporan, dan audit keuangan dilakukan secara real-time dan terintegrasi, sehingga mempercepat administrasi serta meminimalisir potensi penyalahgunaan dana. Temuan ini sejalan dengan pendapat Trimiltin Ricky, bahwa digitalisasi tata kelola pembiayaan pendidikan mampu memperbaiki sistem pelaporan dan meningkatkan transparansi dalam penggunaan dana sekolah.

Secara teoritis, hasil penelitian ini diperkuat oleh pandangan Haidir & Mesiono, yang menjelaskan bahwa manajemen pembiayaan pendidikan harus mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan untuk mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien, serta oleh teori manajemen strategis yang menekankan perlunya strategi adaptif dan inovatif dalam pengelolaan dana untuk menjamin keberlanjutan mutu pendidikan. Selain itu, Nurhayati menegaskan bahwa mutu pendidikan ditentukan oleh keterpaduan input, proses, dan output, sehingga sistem pembiayaan yang transparan dan efektif akan berdampak langsung pada peningkatan kualitas pembelajaran.

Namun demikian, penelitian ini juga menemukan bahwa tantangan struktural masih menghambat efektivitas penerapan digitalisasi pembiayaan, terutama di daerah 3T, seperti keterbatasan jaringan internet, perangkat TIK, dan rendahnya literasi digital tenaga pendidik. Hal ini sejalan dengan temuan Raharjo yang menyatakan bahwa disparitas infrastruktur menjadi hambatan serius dalam implementasi sistem e-RKAS, serta pendapat Simanjuntak bahwa masih banyak sekolah bergantung pada operator eksternal dalam pengelolaan sistem digital sehingga mengurangi kontrol internal sekolah.

Dengan demikian, optimalisasi pembiayaan untuk peningkatan mutu pendidikan di era digital membutuhkan sinergi antara digitalisasi sistem keuangan, peningkatan kapasitas SDM, diversifikasi sumber dana, serta penguatan infrastruktur teknologi. Apabila strategi ini dijalankan secara konsisten, sekolah akan mampu meningkatkan kualitas layanan pendidikan melalui penyediaan sarana TIK yang memadai, profesionalisme pendidik, dan peningkatan prestasi belajar siswa secara berkelanjutan.

³⁸ Mesiono Mesiono dan Haidir Haidir, "Manajemen Pembiayaan Pendidikan (Analisis Konsep dan Implikasinya Terhadap Peningkatan Mutu Pendidikan)," *Hikmah*, vol.17, no. 2 (4 Agustus 2021): 61-73.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Dwinamurti Christanti dkk., "Strategi Mutu Sumber Pembiayaan Berbasis Asset Based Community Development (Abcd) Di Smp N 1 Rawalo," *Manajerial : Jurnal Inovasi Manajemen dan Supervisi Pendidikan*, vol.4, no. 4 (2025).
- Fadhli Muhammad, *Manajemen Peningkatan Mutu Pendidikan*, Jurnal Studi Manajemen Pendidikan, Vol. 1, No. 02, (2017).
- Girsang, A. P. L., Agustuna, R., Sulistyowati, N. P., Sulistyowati, R., & Nugroho, S. W. *Statistik Pendidikan*. In Badan Pusat Statistik Badan Pusat Statitik. Vol.1 No. 5 (2024).
- Hidayati, T. & Prihanarko, R., *Sistem Informasi Keuangan Sekolah Swasta Berbasis Web (Studi Kasus SIMUTU di SD Muhammadiyah Bandung)*. *Jurnal Teknologi Informasi dan Administrasi Pendidikan*, Vol. 4, no.4,(2023).
- Haidir & Mesiono , "Manajemen Pembiayaan Pendidikan (Analisis Konsep dan Implikasinya Terhadap Peningkatan Mutu Pendidikan)," *Hikmah*, vol.17, no. 2 (2021).
- Holilur Rahman, Sulistia Ningrum, Uswatun Hasanah, Ati'atur Robbaniyah, Annawiyah, A., & Halimi, H. (2025). Educational Financing and Professional Allowances as Determinants of Teacher Welfare in Islamic Educational Institutions: A Literature Study on the Role of Edupreneurship as a Teacher Empowerment Strategy. *Responsive: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 1(4), 356–372. <https://doi.org/10.61166/responsive.vii4.54>
- Hukum, dan model. *jurnal indopedia* (inovasi pembelajaran dan pendidikan) vol 1, No 2,(2023).
- J.M Tedjawati, "Kajian Pelaksanaan Dana Khusus Bidang Pendidikann," *Jurna Pendidikan dan Kebudayaan*, vol.7, no.5 (2011).
- Junaidi & Alif Fiandi, *Sumber Sumber Dana Pendidikan*, *Jurnal Basicedu*, vol. 4, no. 4 (2022).
- Kemendikbud. *Peraturan Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan*. Nomor 7607/B.B1/HK.03/2023. Kemendikbud. (2023).
- Khoirina Badriyah. (2025). Islamic Educational Institutions Through Waqf, Maktab, and Kuttub (Correlation of Langghar as a Space for Basic Education). *Kasyafa: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 2(3), 341–350. <https://doi.org/10.61166/kasyafa.v2i3.15>
- Muhammad IrwanPadli Nasution & Dery Shadani, "Optimalisasi Pengelolaan Informasi Data Untuk Peningkatan Kualitas Layanan Di Era Digital," *Journal Of Informatics And Busines*, vol.2, no. 1 (2024).
- M. Raharjo, *Disparitas pemanfaatan Dana BOS di wilayah 3T*. *Jurnal Administrasi Pendidikan Nusantara*, Vol. 9, No. 1,(2024).
- Nadhifa Ardiana Maharani et al., "Analisis Sumber Dan Jenis Pembiayaan Pendidikan Di Indonesia", *Jurnal Bintang Pendidikan Indonesia*, vol. 4, no.1 (2024).

- Nayla Eka Syamsiyah, "Strategi Efektif dalam Perencanaan Biaya dan Optimalisasi Sumber Pendanaan Satuan Pendidikan Islam," *Studi Ilmu Manajemen dan Organisasi*, vol.6, no. 2 (2025).
- Nanu Andriani et al., *Manajemen Pembiayaan Pendidikan Melalui Integrasi Sumber Sumber Pendanaan*, *Jurnal Pelita Nusantara: Kajian Ilmu Sosial Multidisiplin*, vol.2, no.2 (2024).
- Nurhayati dkk, *Dasar-Dasar Manajemen Pendidikan*, (Surabaya : Global Aksara Pers 2022).
- Nike Nur Farida dkk., "Transformasi Digitalisasi Manajemen Keuangan dan Peningkatan Kapasitas Produksi UMKM Pie Ngalam Heritage melalui Program Pelatihan Berbasis Mitra," *I-Com: Indonesian Community Journal*, vol.5, no. 3 (2025).
- Priyanto, E. & Handayani, R., Tata kelola Dana BOS dalam perspektif akuntabilitas. *Jurnal Akuntabilitas Pendidikan*, Vol. 3, No.1, (2019) .
- Pitri, et all, Development of E-Module (Electronic Module) Based on Ethnoscience in Natural Science Subject of Human Reproduction for Junior High Schools. *JERIT: Journal of Educational Research and Innovation Technology*, Vol. 2, No.1, (2025).
- Putra, I. W. & Gunawan, A., Akuntabilitas penggunaan Dana BOS di sekolah terpencil Provinsi NTT. *Jurnal Audit Publik*, vol. 5, no.1, (2022).
- Rusman, *Manajemen Kurikulum*, Jakarta: Raja Wali Pers, (2009),
- Rachmawati, T. & Kusnadi, F., Literasi digital guru dalam era pendidikan 4.0 di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Digital*, Vol, 6 No. 1, (2022).
- Rustantinah sri, dkk. manajemen pembiayaan dalam peningkatan mutu di smp negeri 1 moga kabupaten *Pemalang*. *Jurnal Pendidikan dan Konseling* Vol. 4, No. 6, (2022)
- Suranto & Widiyarti , *Konsep Mutu dalam Manajemen Pendidikan Vokasi*, (Semarang: ALPRIN), (2019),
- Sindi Septia Hasnida, dkk. *Transformasi Pendidikan Di Era Digital*. *Jurnal Bintang Pendidikan Indonesia (JUBPI)* Vol.2, No.1 (2024).
- Trimiltin Ricky, dkk. *Digitalisasi tata kelola pembiayaan pendidikan peluang dan tantangan implementasi e-rkas*. *jurnal manajemen pendidikan* Vol. 10, No. 3, (2025).
- T. Simanjuntak, Digitalisasi pelaporan Dana BOS: Studi kasus di Kabupaten Banyuwangi. *Jurnal Teknologi Pendidikan*, Vol.15, No.1, (2023).
- W. P, Ferdi. *Pembiayaan Pendidikan: Suatu Kajian Teoritis*, *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, vol. 19, no.4 (2013).
- Wirian Oktrigana, et al, *Model-Model Pembiayaan Pendidikan*, *Jurnal Ilmu Pendidikan dan Pengajaran*, Vol. 1, no.1 (2022).
- Yulianto, B., & Arifin, M. (2021). Transformasi digital dalam pendidikan: Sebuah analisis kebijakan. *Jurnal Kebijakan Pendidikan*, 9(3), 221-233.
- Nugroho, et all, Implementasi BOS afirmasi dalam peningkatan sarana digital sekolah. *Jurnal Kebijakan Pendidikan*, vol. 11(2), . (2021).

Zohriah Anis, dkk. *Manajemen pembiayaan pendidikan di lembaga pendidikan: konsep, landasan hukum, dan model.* jurnal indopedia (inovasi pembelajaran dan pendidikan) vol 1, No 2, (2023)